



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap melindungi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAYANAN TERHADAP PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN
DAN PERTANAHAN BERDASARKAN PASAL 5 PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DESA DIKANTOR DESA LUBUK BESAR
KECAMATAN KEMUNING**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HELMI KUSRI

11627104290

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1443/2021 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Pelayanan Terhadap Penyediaan
Data Kependudukan dan Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di
Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil"*, yang ditulis

oleh:

Nama : HELMI KUSRI

NIM : 11627104290

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 April 2021

Pembimbing Skripsi

SYAFRI NALDI, SH, MH
NIK 198109232006041004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAYANAN TERHADAP PENYEDIA DATA KEPENDUDUKAN DAN PERTANAHAN BERDASARKAN PASAL 5 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAAN MINIMAL DESA DI KANTOR DESA LUBUK BESAR KECAMATAN KAMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"* yang ditulis oleh :

Nama : **HELMY KUSRI**
NIM : 11657104290
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, SH., MH.

Stretaris
Dr. M. Alfi Syahrin, SH., MH

Penguji I
Pri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
Lisa Angraini, SH., MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Helmi Kusri : Pelayanan Terhadap Penyediaan Data Kependudukan Dan Pertanahan Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan Terhadap Penyediaan Data Kependudukan Dan Pertanahan Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning belum berjalan dengan baik, bahwa pada umumnya pelayanan yang ada masih bercirikan berbelit-belit, lambat, dan tidak akuntabel.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning sudah berjalan namun belum terlaksana dengan baik sepenuhnya. Adapun faktor penghambatnya adalah; (i) kurangnya ketanggapan aparat desa; (ii) tidak adanya standar pelayanan minimal desa; serta (iii) kurangnya sarana dan prasarana Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelayanan Terhadap Penyediaan Data Kependudukan Dan Pertanahan Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Kurnia NZ dan Ibunda Srihanun yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.

Terimakasih juga kepada saudara perempuan penulis yaitu, Hera Putri Ani, yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta doa dan support yang selalu diberikan kepada penulis hingga mencapai pada keberhasilan penulis.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr. Hajar, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Firdaus, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.

9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

HELMY KUSRI

NIM : 11627104290

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | |
| B. Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umun Desa Lubuk Besar | 18 |
| B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lubuk Besar | 21 |
| C. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Besar ... | 22 |
| D. Lembaga Kemasyarakatan..... | 23 |
| E. Sarana Dan Prasarana Umum Desa Lubuk Besar | 24 |
| BAB III TINJAUAN TEORITIS | |
| A. Teori Tentang Pemerintahan Daerah | 26 |
| 1. Pengertian tentang Pemerintahan Daerah..... | 26 |
| Asas-asas Tentang Pemerintahan Daerah..... | 27 |
| Bentuk-bentuk Pemerintahan Daerah | 33 |
| Sejarah Pemerintahan Daerah..... | 37 |
| B. Teori Pemerintahan Desa..... | 40 |
| Pengertian Desa | 40 |
| Pelayanan Minimal Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa | 42 |
| Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa | 48 |
| C. Otonomi Desa | 52 |
| D. Teori tentang Pelayanan Publik | 54 |
| Pengertian Pelayanan Publik | 54 |
| Bentuk-bentuk Pelayanan Publik..... | 58 |
| Sistem Pelayanan | 60 |



BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pelayanan Terhadap Penyediaan Data Kependudukan Dan Pertanahan Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning..... | 62 |
| B. Faktor Penghambat Pelayanan Terhadap Penyediaan Data Kependudukan Dan Pertanahan Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning..... | 69 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran | 75 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dianggap melanggar hak cipta jika ada yang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel I.1 | Populasi dan Sampel | 12 |
| Tabel II.1 | Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir..... | 22 |
| Tabel II.2 | Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir | 23 |
| Tabel II.3 | Prasarana Pendidikan..... | 24 |
| Tabel II.4 | Prasarana Peribadatan | 24 |
| Tabel II.5 | Prasarana Kesehatan | 25 |
| Tabel II.6 | Prasarana Olahraga | 26 |
| Tabel IV.1 | Pelayanan Penyediaan Data Kependudukan Dan Pertanahan Di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir..... | 67 |
| Tabel IV.2 | Kedisiplinan Aparatur Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir..... | 71 |
| Tabel IV.3 | Pelayanan Yang Berbeli-Belit..... | 73 |
| Tabel IV.4 | Sarana Dan Prasarana Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir..... | 74 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat 1 disebutkan pula bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.¹

Pemerintah daerah (*local goverment*) berdasarkan dari perkembangan praktik pemerintah di Eropa pada abad ke 11 dan 12 pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah dari tingkat dasar yang secara ilmiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola di sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama *municipal* (kota), *county* (kabupaten), dan *commune/gemente* (desa).²

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa “Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³

¹ Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
² M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*, (Yogyakarta : Total Media, 2013), hal. 69
³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7



Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa meliputi Penyelenggaraan Urusan Bidang Eksekutif yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui Kepala Desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan.⁴

Sedangkan penyelenggaraan urusan bidang legislatif dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi. Sehingga adanya *checks and balances* antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Desa di bawah kabupaten/kota. Penempatan desa di bawah kabupaten/kota berarti desa menjadi subordinat kabupaten/kota dalam hubungan wilayah administrasi dan/atau dekonsentrasi. Dengan demikian, Desa tidak berbeda dengan kelurahan yang sama-sama di bawah kabupaten/kota.⁶

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Urusan Pemerintah diselenggarakan oleh pemerintah sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau Pemerintahan Desa.⁷

⁴ Bambang Trisantono Sumantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung : Fokusmedia, 2011) hlm. 3-4

⁵ H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2007) hlm. 93.

⁶ H.A. Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Berprestasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) hlm.13

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013) hlm. 363

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Istilah publik berasal dari bahas inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahkan *Praja*, hanya sejak zaman Belanda kata-kata sansekerta sudah salah kaprah. Arti sebenarnya dari kata Praja adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah Pamong Praja⁸. Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, dengan tanpa ada pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kebutuhan masyarakat.

Ada 4 (tempat) alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan *good governance* di Indonesia yaitu:

- Pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah.
- Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi.
- Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek *clean* dan *good governance* dapat diartikulasikan secara mudah.
- Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance* dan mekanisme pasar.

⁸ Ibnu Kencana Safiee, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta, Penerbit Rineka Cipta: 2010). hlm. 17



elayanan administratif yang dimaksud adalah pelayanan administratif yang mendukung tumbuh kembangnya menyusun sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah di pandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dalam mewujudkan pembangunan yang desentralistik dan demokratis, termasuk dalam pemerintahan desa karena pemerintahan desa termasuk dalam bagian pemerintah daerah.⁹

Untuk melaksanakan reformasi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, salah satu hal mendasar yang harus dilakukan pada saat ini adalah keseluruhan misi reformasi diarahkan pada upaya untuk memberdayakan masyarakat, baik sebagai pemilik kedaulatan negara maupun sebagai subyek dan obyek reformasi politik itu sendiri. Masyarakat harus diyakinkan bahwa mereka mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa. Dalam pengertian bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat semakin membuka diri dalam menanggapi aspirasi-aspirasi, tuntutan dan harapan yang berkembang dalam masyarakat. Di samping itu masyarakat juga harus diberi keleluasaan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan pemerintahan dan

⁹ Abu Samah dan Ali Bembi, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Indonesia*, STAI H M (Pekanbaru: Lukman Edi Press 2016), hlm.232



kelegaan, hal mana merupakan intisari dari demokrasi yang menjunjung tinggi kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan¹⁰.

Berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ini, merupakan kesempatan bagi daerah kabupaten/kota untuk mengatur sendiri pembentukan, kedudukan, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah dan kemampuan daerah sehingga dapat berbeda antara daerah kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya. Daerah lebih leluasa dalam menentukan dan memberikan kewenangan kepada Desa dalam rangka memenuhi tuntutan, keinginan dan kebutuhan masyarakat, terlebih lagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa banyak berkaitan langsung dengan pemberian pelayanan publik. Kualitas pelayanan di Desa diharapkan akan menjadi lebih baik dibandingkan pada saat pengaturan yang sentralistik. Sehingga diharapkan mampu selalu dapat beradaptasi dengan kemajuan yang begitu cepat dan tidak dapat diprediksi dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.¹¹

Kemajuan yang begitu cepat dalam masyarakat dan hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang bersifat dinamis, serta keberadaan birokrasi pemerintah tersebut, menuntut aparat pemerintah yang bertugas pada level mikro (dimana pelayanan secara langsung oleh aparat terhadap masyarakat berlangsung) atau mereka menempatkan diri pada garis paling depan untuk secara jernih, peka dan responsif membaca denyut nadi publik yang wajib diladeni. Aparatur harus senantiasa berusaha baik secara mandiri,

¹⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 19

¹¹ Sadu Wastiono dan M. Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Jakarta: Fokus Media, 2007), hlm. 27.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



apapun secara organisasi berusaha meningkatkan keprofesionalan terkait dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang ada. Pelayanan yang positif dan berkualitas secara empiris pada satu sisi akan menciptakan kepuasan, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat. Pada sisi lain, merupakan ukuran tingkat kinerja birokrasi pemerintahan, oleh karena itu pada level inilah, baik dan tidaknya citra pemerintah dimata masyarakat dipertanyakan.¹²

Sebagaimana di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yang mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017 dalam Pasal 5 di nyatakan bahwa, SPM desa antara lain harus :

- a) Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan ;
- b) Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
- c) Pemberian surat keterangan;
- d) Penyederhanaan pelayanan ; dan
- e) Penguatan masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 di jelaskan bahwa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat

¹² Tamim, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2009). hlm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.¹³

Maka dari itu pelayanan minimal desa yang selanjutnya disebut dengan pelayanan minimal desa adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan yang merupakan standar desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. Oleh karena itu kepala desa memiliki wewenang menetapkan pelayanan minimal desa.

Dengan adanya standar pelayanan minimal (SPM) diharapkan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan data dan informasi kependudukan dan pertanahan. Sesuai dengan Pasal 3 Permendagri ini standar pelayanan minimal desa bertujuan mendorong percepatan pelayanan masyarakat, memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangannya dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Desa.

Namun kenyataannya pelayanan minimal di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa tersebut, bahwa tidak adanya penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan di kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil, sehingga masyarakat bingung mau meminta data kemana. Padahal Pemerintah Desa wajib untuk menyediakan data dan informasi kependudukan dan pertanahan tersebut kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa



Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Minimal Desa di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil, serta bagaimana faktor penghambat pelaksanaan pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelayanan Terhadap Penyediaan Data Kependudukan Dan Pertanahan Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning”**.

B. Batasan Masalah

Batasan dalam permasalahan yang akan penulis angkat adalah terfokus pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning ?
2. Apa faktor penghambat pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning?



Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning

2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.¹⁴

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan berbagai manfaat :

- a. Manfaat Teoritis

¹⁴ Nawawi, Hadaridan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal* (Yogyakarta: UGM Press, 1995) hlm. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- 2) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning.
- 4) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang bagaimana pelayanan di kantor desa lubuk besar kecamatan kemuning kabupaten inhil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
- 2) Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pentingnya Pelayanan Minimal Desa.
- 3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditentukan dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan¹⁵. Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris: *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat diartikan untuk menyelesaikan atau menjawab problem.¹⁶ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹⁷

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian lapangan/sosiologis yaitu jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai bagaimana pelayanan di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian yaitu Kepala Desa Lubuk Besar, staf Desa Lubuk Besar, dan masyarakat Desa Lubuk Besar.

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) jilid 1, hlm.1.

¹⁶ *Ibid*, hlm.2

¹⁷ *Ibid*



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Objek penelitian adalah yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian yang akan di teliti adalah Pelayanan di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹⁸

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁹ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

20

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

| No | Responden | Populasi | Sample | Persentase |
|----|---------------------|-----------|----------|------------|
| 1 | Kepala Desa | 1 orang | 1 orang | 100% |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 orang | 1 orang | 100% |
| 3 | Staf/Perangkat Desa | 5 orang | 1 orang | 20% |
| 4 | BPD | 5 orang | 2 orang | 40% |
| 5 | Masyarakat | 300 orang | 25 orang | 8,% |

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo,2011), hlm.122
¹⁹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub,2011), hlm,155
²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika, 2011), hlm.175



Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.²¹ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti .

b. Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²²

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²¹ Ibid., hlm.195

²² Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.²³ Observasi dilakukan di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil. Observasi ini melakukan pengamatan langsung terhadap pelayanan di Kantor Desa Lubuk Besar, serta mengamati hal-hal yang dianggap penting.

b. Wawancara

²³Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm.131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.²⁴ Adapun wawancara dilakukan kepada 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Perangkat Desa, 2 orang Badan Permusyawaratan Desa.

c. Angket

Angket adalah suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis.²⁵ Adapaun angket diberikan kepada 25 orang masyarakat Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning.

7. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari study lapangan diteliti dengan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, apa yang dikatakan responden baik secara lisan maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan utuh, kemudian dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu skripsi yang ilmiah.

8. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya.²⁶

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 138.

²⁵ *Ibid.*, hlm.135

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 250.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematis yaitu membagi pokok-pokok skripsi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat sub-subbab. Penulis dalam skripsi ini membagi dalam lima bab yang diuraikan seperti di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini membahas sejarah desa, keadaan wilayah desa, struktur organisasi pemerintahan desa Lubuk Besar.

BAB III : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas konsep-konsep dan kajian teori yang terdiri dari pemerintah daerah, sistem pemerintahan desa, pelayanan publik, pelayanan minimal desa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2017 dan teori demokrasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pelaksanaan pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil, serta faktor penghambat pelaksanaan pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Lubuk Besar

Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi

Riau adalah sebelum menjadi Desa/Kelurahan terdiri dari beberapa nama:

- 1) Tambangan;
- 2) Penggair Tuan;
- 3) Pulau Tebang atau Pulau Besar;
- 4) Sungai Raden;
- 5) Kampung Gelam;
- 6) Lubuk Trap;
- 7) Pecah Pinggan;
- 8) Danau Petai;
- 9) Pendam Tepuruk.

Searena mau diadakan pengurus Kampung/Penghulu/Desa maka dicarilah nama kampung tersebut dengan melalui musyawarah dan mufakat maka muncullah nama Lubuk Besar, Lubuk Besar artinya; Lubuk artinya Dalam, Besar artinya Luas. Seiring dengan bertambahnya penduduk serta perlunya pemimpin/penghulu maka di tunjukkan penghulu yang pertama kalinya di Lubuk Besar yang bernama Mainggo berkisar pada Tahun 1850.

Setelah kurang lebih 30 Tahun lamanya Mainggo menjadi penghulu pada Tahun 1880 diserahkan kepada anaknya yang bernama Prat dan Sekretarisnya adalah adiknya



Seorang yang bernama Sudin, setelah beberapa lama Prat menjadi penghulu sekitar Tahun 1907 maka diserahkan kepada adiknya yang bernama Kebut, tetapi Kebut tidak sanggup maka diserahkan kepada sepupunya yang bernama Barang dan wakilnya bernama Kebut.

Setelah 30 Tahun lamanya Barang menjadi penghulu, maka dapatlah penghargaan dari Belanda dikarenakan masyarakatnya tidak pernah berurusan sampai kepada Gentler dan Camat, penghargaan tersebut berupa Bintang terbuat dari Emas serah terima penghargaan tersebut pada pasar malam 1 bulan lamanya acara joget-joget didatangkan dari Manda nama penjogetnya adalah diantaranya bernama Rimbun dan satunya lagi bernama Nimah berkisar pada Tahun 1937.

Setelah 21 Tahun lamanya berkisar pada pada Tahun 1958 maka diserahkan kepada minantunya yang bernama Jahari anak dari Prat cucu dari Mainggo, setelah tahun 1974 diserahkan kepada iparnya yang bernama Nurdin anak penghulu Barang.

Setelah beberapa lama Nurdin menjadi penghulu maka diadakan pemilihan maka saat itu terpilihlah M. Nur cucu dari Mento, belum sampai 1 periode M. Nur meninggal dunia, maka dipegang oleh Kecamatan (PJS) bernama Agus Mursi, setelah beberapa lama Agus Mursi menjadi PJS maka diadakan pemilihan kembali dan terpilih pada saat itu menjadi penghulu Syamsuri orang dari Kota Baru Reteh yang istrinya cucu dari Sijus, setelah 1 periode Syamsuri menjadi penghulu maka diadakan pemilihan kembali, dan untuk sementara dipegang oleh Kecamatan yang bernama Ibrahim Agung, oleh Ibrahim Agung dipercayakan kepada Khairuddin selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, lalu dilaksanakan pemilihan maka terpilihlah Khairuddin sebagai

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghulu, setelah 1 periode Khairuddin menjadi penghulu diadakan pemilihan kembali dan sementara dipegang oleh Kecamatan yang bernama Puasa Efendi, kurang lebih 1 Tahun lamanya, setelah diadakan pemilihan kembali maka terpilihlah Khairuddin menjadi penghulu atau Kepala Desa. Setelah habis masa jabatan Khairuddin 2 periode, maka diadakan pemilihan kembali dan untuk sementara PJS dipegang oleh Kecamatan bernama Hamsani kurang lebih 1 Tahun lamanya dan setelah itu diadakan pemilihan maka terpilihlah Aprizal sampai habis masa jabatannya kurang lebih 6 Tahun dan pada saat sekarang ini dijabat oleh PJ Kepala Desa Marsil S.Sos dari pihak Kecamatan, setelah itu diadakan pemilihan Kepala Desa di Desa Lubuk Besar dan terpilih lah Ahmad Samadi selaku Kepala Desa Lubuk Besar sampai saat ini.

Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir mempunyai luas wilayah 765.000.000,- M2 (9000x8500) yang meliputi areal pemukiman, perkebunan, persawahan/ladang, pemakaman, perkarangan dan prasana umum.²⁷

Adapun batas-batas wilayah Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Raja
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kemuning Muda
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Limau Manis

²⁷ Data diperoleh dari Profil Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir



Penduduk Desa Lubuk Besar berjumlah 993 jiwa yang terdiri dari 482 jiwa penduduk laki-laki dan 511 jiwa penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga mencapai 342 KK. Penduduk Desa Lubuk Besar mayoritas adalah penganut agama Islam. Sedangkan kelompok etnis penduduk yang terdapat di Desa ini adalah suku Melayu. Mata pencaharian penduduk Desa Lubuk Besar pada umumnya adalah pada bidang pertanian. Potensi hasil pertanian Desa setempat meliputi tanaman pangan, komoditas buah-buahan, dan perkebunan. Jenis mata pencaharian penduduk Desa lainnya meliputi berbagai profesi antara lain yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan sebagainya.²⁸

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Besar

Pemerintahan Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri

Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu sejumlah perangkat Desa, yaitu:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Kepala Urusan Umum
- 4) Kepala Urusan Keuangan
- 5) Kepala Urusan Pemerintahan
- 6) Kepala Urusan Pembangunan

Ibid

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

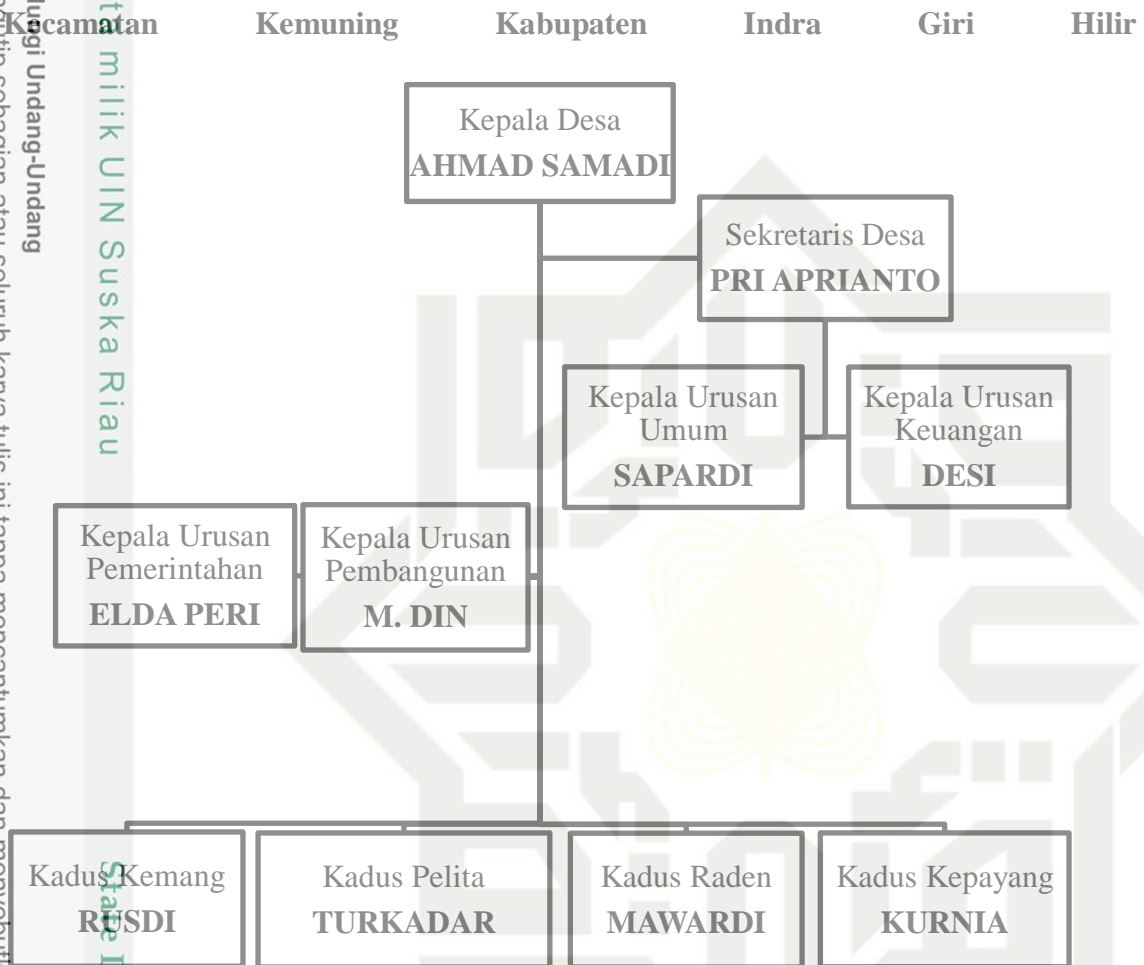


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Besar



C. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Besar

Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh beberapa orang anggota :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

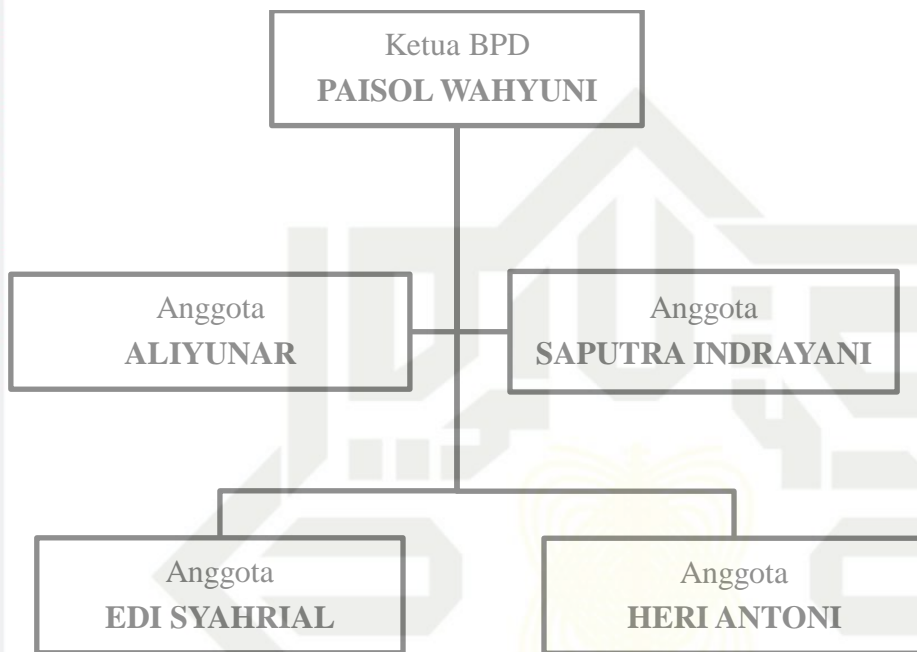
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir



Sumber : Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning

Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir :

- 1) PKK; jumlah pengurus 20 orang
- 2) Rukun Warga (RW); jumlah pengurus 5 orang
- 3) Rukun Tetangga (RT ; jumlah pengurus 5 orang
- 4) Organisasi Pemuda ; jumlah pengurus 8 orang
- 5) Organisasi keagamaan; jumlah pengurus 12 orang



Prasarana dan Prasarana Umum Desa Lubuk Besar

Prasarana Pendidikan

Adapaun prasarana pendidikan di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir yaitu seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel II.3
Prasarana Pendidikan

| NO | Prasarana Pendidikan | Jumlah (Unit) |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | Taman Kanak-kanak (TK) | 1 |
| 2. | Sekolah Dasar (SD) | 1 |
| 3. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 1 |

Sumber : Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir terdapat 1 unit Taman Kanak-Kanak, 1 unit Sekolah Dasar (SD) dan 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMP).

Prasarana Peribadatan

Prasaran peribadatan di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.4
Prasarana Peribadatan

| No | Prasarana Peribadatan | Jumlah (Unit) |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Musholla | 1 |
| 2. | Masjid | 4 |

Sumber : Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka prasarana peribadatan yang ada di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir yaitu sebanyak

1. Disaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 unit masjid. Tersedianya prasarana peribadatan di pedesaan akan mendukung upaya peningkatan pengamalan kehidupan beragama bagi masyarakat Desa setempat.

Prasarana dan Sarana Kesehatan

Prasarana dan sarana kesehatan di pedesaan sangat berperan dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Desa. Prasaran dan sarana kesehatan yang terdapat di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.5
Prasarana Kesehatan

| No | Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Puskesmas | 1 |
| 2. | Polindes | 1 |

Sumber : Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning

4. Prasarana Olahraga

Prasarana olahraga yang ada di Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir yaitu seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel II.6
Prasarana Olahraga

| No | Prasaran Olahraga | Jumlah (Unit) |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Lapangan sepak bola | 2 |
| 2. | Lapangan bola voli | 3 |
| 3. | Bulu tangkis | 1 |

Sumber : Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Tentang PEMDA

1. Pengertian PEMDA

Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara, seperti halnya yang terdapat pada negara federal. Konsekuensi dari pilihan bentuk negara ini maka penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat wilayah Republik Indonesia sangat luas dengan beribu-ribu pulau, aneka ragam suku dan budaya sudah dapat dipastikan tidak mungkin segala sesuatunya diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, para pendiri Negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah, sebagaimana dituangkan dalam pasal 18 UUD 1945:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa²⁹”

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan

²⁹ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005) hlm. 119



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dilaksanakan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974. Undang-Undang itu mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan¹⁵.

Asas-asas PEMDA

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan negara yang bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaran negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam

¹⁵ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005). hlm.37



Setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Asas kepastian hukum mempunyai dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali.

Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas.

Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Unsur ini memegang peranan misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya.

Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

- Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prinsip golongan, dan rahasia negara.

Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak asasi pribadi, dan kewajiban penyelenggara negara, asas proporsionalitas sendiri juga diartikan sebagai asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional..

Profesionalitas bersasal dari kata profesi yang berartikan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Pendapat Syafruddin bahwa profesional menyangkut itu menyangkut tiga hal, yaitu bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukan.

Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, serta kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas sendiri adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering

1. Diartikan sebagai asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional..
2. Diartikan sebagai asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional..



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan responsibility yang dapat dipertanyakan answerability, yang dapat dipersalahkan blameworthiness dan yang mempunyai ketidakbebasan liability termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.

Salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problemabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bila mana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Dasar-dasar penyelenggara pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mencantumkan tiga asas lagi yakni asas kepentingan umum, asas efektif dan



Asas efisien. Dengan juga, menggunakan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas pembantuan antarlain Asas kepentingan umum, adalah asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum.

Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepenringan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi. Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh masyarakat untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Penggunaan prinsip dari asas kepentingan umum ini adalah ingin memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat untuk menjalankan hukum yang sudah diberikan, tetapi hukuman yang dilakukan juga tidak akan terikat dengan apa yang sudah diberikan oleh suatu negara itu sendiri. Dan juga asas ini memiliki arti mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Asas efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna, devenisi dari kata efektif adalah pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif. lainnya. Jadi, jika suatu kegiatan atau pekerjaan bisa selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Asas efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, efisiensi juga merupakan suatu



ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dekondentrasi atau desentralisasi jabatan (*ambtelike decentralisatie*) Yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintah. Misalnya pemilihan menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota dan seterusnya secara berjenjang. Desentralisasi yang semacam ini rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur atau dibawa-bawa.

Asas Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem kesatuan Negara RI. Desentralisasi ketatanegaraan atau (*staatkundig decentralisatie*) yang sering juga disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en bestuurende beverheid*) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing.

Desentralisasi dibedakan menjadi dua, desentralisasi territorial (*territorial decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomie*), batas pengaturannya adalah daerah. Desentralisasi

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dan Merek Dagang Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desentralisasi mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan. Dan desentralisasi fungsional (funcionale decentralisatie) yaitu pemilihan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi.

Di samping asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia juga dikenal medebewind, tugas pembantuan. Di Belanda medebewind diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Menurut Bagir Manan tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, medebewind sering disebut serta tugas pembantuan. Asas Tugas Pembantuan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi ke pada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

6. Bentuk-bentuk Pemerintahan Desa

Secara umum ada 2 (dua) bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu Local Self Government dan Local State Government.

Local Self Government Pemerintah daerah dalam bentuk Local Self Government berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk Local Self Government ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Walaupun pemerintahan daerah dalam bentuk Local Self Government memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsistem dari sistem pemerintahan Negara.

Bentuk pemerintahan daerah Local Self Government merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan undang-undang dibentuk pemerintahan daerah tertentu dan selanjutnya daerah tersebut disertai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu dan pada perkembangannya dapat dipecah atau memecarkan menjadi beberapa daerah tertentu. Sebaliknya berdasarkan undang-undang daerah dimaksud dapat digabungkan dengan daerah lain atau bahkan dapat dihapuskan jika ternyata dalam perkembangannya daerah tersebut memandang tidak mampu mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Bentuk Local Self Government itu diperlukan untuk merespons



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak mungkin ditangani secara terpusat oleh pemerintah pusat. Penanganan urusan pemerintahan ini akan lebih baik jika ditangani oleh pemerintahan daerah tertentu (Local Self Government).

Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, Local Self Government adalah pemerintahan daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Terdapat ciri-ciri tertentu Local Self Government atau pemerintahan daerah otonom, yaitu sebagai berikut.

- b. Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri. Oleh sebab itu, urusan-urusan tersebut perlu ditegaskan secara terperinci.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah.

Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja.

Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

Demikian, Local Self Government atau pemerintahan lokal daerah dalam



Sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi yang dapat mengurus rumah tangga sendiri. Hak otonom dalam Local Self Government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara.

Local State Government

Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Local state government atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi sosial merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan komunikasi fisik. Banyak pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu ditentukan oleh seberapa jauh hubungan face to face antara pejabat pemerintah pemberi pelayanan dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan untuk memperoleh respons dari anggota masyarakat secara langsung. Pentingnya

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintahan.

Wilayah pada hakikatnya untuk memaksimalkan respek masyarakat terhadap program pemerintah. Sebagai konsekuensinya tugas pemerintahan wilayah hanya terbatas pada pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Terdapat beberapa ciri dari pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif, yaitu:

- a. bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan;
- b. pelimpahan kekuasaan ditujukan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah;
- c. kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat;
- d. pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri.

4. Sejarah PEMDA

Sejarah perjalanan pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia senantiasa mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur secara khusus tentang pemerintahan daerah bergulir sejak Negara ini berdiri.

Dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa



Implementasi terhadap pemerintahan daerah begitu rumit dan kompleks karena banyaknya persoalan yang perlu diatur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hal di atas, tampak berbagai persoalan muncul seiring dengan semangat tuntutan akan pelaksanaan desentralisasi secara utuh oleh pemerintah daerah. Pemerintahan daerah senantiasa bergerak menuju kepada penataan kelembagaan yang lebih baik lagi mulai dari tingkatan desa sampai dengan level provinsi.

Kompleksitas pengaturan berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah menjadi isu hangat setiap periodeisasi dari pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Hubungan pemerintah dan pemerintah daerah tidak luput juga menaruh andil terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada level dibawahnya, hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa-desa yang ada dibawahnya menjadi perbincangan hangat dalam rangka menemukan formulasi yang tepat guna mengatur persoalan-persoalan di atas.

Topik-topik yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan dan hubungan serta keuangan menjadi topik yang sentral yang mewarnai setiap perubahan terhadap peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Parik ulur kepentingan di pusat dan daerah hingga desa tidak dapat dilepaskan begitu saja dari perjalanan pemerintahan daerah yang ada saat ini.

Sejarah memberikan fakta bahwa pasca reformasi, UndangUndang 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang 32 Tahun 2004 telah memberikan ruang yang begitu

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



besar bagi pemerintah daerah untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri melalui asas desentralisasi. Akan tetapi masih terdapat kekurangan di sana sini dalam praktek dilapangan.

Pemecahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjadi beberapa bagian khusus, tentunya akan berdampak kepada pelaksanaan otonomi daerah yang ada saat ini. Bagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipecah menjadi beberapa bagian pengaturan antara lain; pemerintahan daerah, desa, dan pemilihan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang digunakan \pm 10 tahun memuat begitu banyak pengaturan terkait pemerintahan daerah yang pada akhirnya menyisakan berbagai persoalan.

Semangat lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Dari ketentuan di atas yang sudah berlaku, secara tidak langsung mempengaruhi produk hukum di daerah baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun yang lainnya yang sebelumnya sudah berlaku terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyisiran terhadap produk-produk hukum daerah khususnya peraturan daerah yang tidak lagi sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintahan daerah maupun desa yang berlaku saat ini agar dapat segera untuk disesuaikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan melihat matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa terdapat beberapa urusan pemerintah kabupaten/kota yang telah beralih menjadi urusan pemerintah provinsi.

Urusan-urusan yang sebelumnya menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota yang diperkuat dengan peraturan daerah tentunya secara hukum perlu untuk direvisi mengingat urusan tersebut kini bukan lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota melainkan menjadi urusan pemerintah provinsi.

Sejalan dengan itu juga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga memberikan dampak tersendiri terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang ada saat ini. Beberapa ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah tidak lagi sejalan dengan peraturan daerah yang ada saat ini.

Teori Tentang Desa

1. Pengertian desa

alam teori Hukum Tata Negara, pembagian tugas dan atau wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



horizontal adalah pembagian tugas dan atau wewenang menurut fungsinya yang mana petugas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan sama dengan petugas lain yang ruang lingkupnya berbeda.³¹

Pembagian secara vertikal adalah pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatannya yang mana petugas dalam melaksanakan tugas dan atau wewenangnya mempunyai kedudukan yang berbeda tingkatannya dengan petugas lain, petugas yang lebih tinggi kedudukannya dapat melimpahkan tugas dan atau wewenang kepada petugas yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program otonomi dan desentralisasi dalam konsep Negara kesatuan, merupakan salah satu bentuk pembagian tugas dan wewenang dengan cara vertikal.³²

Penyelenggaraan pemerintahan desa di bumi nusantara ini bukan adopsi dari sistem negara penjajah melainkan asli dari masyarakat Indonesia. Keaslian itu diakui oleh van vollenhoven dalam bukunya *Staatsrecht overze* bahwa pada tahun 1906 ketika kapal berbendera Belanda yang pertama memasuki perairan kepulauan Indonesia wilayah ini secara hukum ketatanegaraan bukanlah wilayah yang “liar dan kosong”. Di mana terdapat setumpuk lembaga-lembaga pengaturan dan kewibawaan, meliputi pemerintahan oleh atau terhadap suku-suku, desa-desa, persekutuan-persekutuan republik dan kerajaan-kerajaan.³³

Bentuk Pemerintahan Desa sebenarnya tidak ada ketentuan Perundangan Undangan yang secara tegas menyatakan bahwa Desa merupakan Daerah Otonom,

R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 89

Ibid
Dasril Rajab, *Op. Cit*, hlm. 144

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



namun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, kesatuan masyarakat adalah hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.³⁴

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari ketentuan ini dapat kita menyimpulkan bahwa kalimat "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat". ini dapat diartikan Desa adalah daerah otonom karena adanya kewenangan yang diberikan perundangan-undangan kepada desa untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat desa setempat, yang mana kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri merupakan inti makna dari istilah otonomi.³⁵

Secara umum desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan "peradaban" yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian.³⁶ Penyebutan desa lebih akrab ditelinga orang Jawa, Madura dan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Suhartono, dkk, *Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Jakarta : Laper Pustaka Utama, 2001) hlm. 9

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Desa, Dusun dan Marga (sumatraa selatan), Dusundati (Maluku), Kuta atau Huta (Batak), Nagari (Minangkabau), Aceh menyebutnya Garmpong.

Sedangkan sebutan Kepala Desa juga menggunakan istilah yang berbeda pada tiap-tiap bagian daerah seperti di daerah Tapanuli Kepala Desa disebut Kepala Nagari, di Sumatra Selatan disebut dengan nama Pesirah, di daerah Jawa disebut dengan Lurah, di daerah Bali disebut Tembukung, di daerah Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, di daerah Maluku disebut Kepala Nagari dan di berbagai daerah di papua disebut Kurano. Masih banyak lagi sebutan yang bercorak ragam menurut istilah-istilah daerah setempat yang sebenarnya mempunyai pengertian yang sama.³⁷

Susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikatagorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu:³⁸

- a. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
- b. Tipe kesatuan masyarakat umum bedasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
- c. Tipe kesaturan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Selain dari pada itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa yaitu:

³⁷ Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, *Prospek Perkembangan Desa*, (Bandung : CV Fokus Media, 2007) hlm. 9
³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif berserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.

Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan kepadatan, persebaran dan mata pencarian penduduk desa setempat.

Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa tadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).³⁹

Dalam pengertian sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam.⁴⁰

Dari sudut pandang politik dan administrasi pemerintahan, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sanat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Pengertian tersebut termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya yaitu dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian dalam pengertian ini, masih belum tergambarkan secara jelas

³⁹ Ibid, hlm.10

⁴⁰ Suhartono, dkk, *Op. Cit*, hlm.10

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengenai kualitas otoriter yang dimiliki oleh desa.⁴¹

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut ketentuan ini Desa adalah suatu masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya otoritas politik di dalam suatu komunitas yang disebut dengan desa secara internal mudah dipahami, dengan melihat sejarah perkembangannya. Secara faktual jumlah penduduk bertambah dan masalah-masalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat bertambah. Kenyataan tersebut sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas yang diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang merealisasikan aspirasi yang berkembang. Dari berbagai pengertian desa tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan ada beberapa ciri desa secara umum⁴² :

- a. Desa umumnya terletak sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
- b. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
- c. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat
- d. Tidak seperti di kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh dirinya sendiri”.

⁴¹ Ibid, hlm. 14

⁴² Ibid, hlm. 16

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.

Memiliki tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif ketat dari pada kota.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴³

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa “Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi Penyelenggaraan Urusan Bidang Eksekutif yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui Kepala Desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan.⁴⁴

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014

⁴³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

⁴⁴ Bambang Trisantono Sumantri, *Op.Cit.* hlm. 3-4



Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴⁵

Sedangkan penyelenggaraan urusan bidang legislatif dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴⁷

Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, bahwa pada Pemerintahan Desa terdapat dua unsur penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif. Undang-Undang ini memberikan penegasan terhadap adanya pembagian kekuasaan pada Pemerintahan Desa.⁴⁸

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
H.A.W. Widjaja, *Op.Cit* .hlm. 93
⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Hak Cipta ini milik HIN UIN Suska Riau
- Hak Cipta ini milik HIN UIN Suska Riau
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelayanan Minimal Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

Standar Pelayanan Minimal Desa merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat secara minimal. Penetapan Standar Pelayanan Minimal Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dimaksudkan agar:

- Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan sasaran.
- Semakin dekat rantai birokrasi yang ditempuh oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.
- Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pelayanan.

Adapun ruang lingkup standar pelayanan minimal desa meliputi:

- Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan.
- Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan.
- Pemberian surat keterangan.
- Penyederhanaan pelayanan.
- Pengabdian masyarakat.

C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hal tradisional yang diakui dan



informasi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Desa berkedudukan diwilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
5. Meningkatkan daya saing desa.

Kewenangan desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

1. Dianggap sebagai bagian dari seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kewenangan lokal berskala desa;

Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan;

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan atas 11 asas:

1. Kepastian hukum;

2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;

3. Tertib kepentingan umum;

4. Keterbukaan;

5. Proporsionalitas;

6. Profesionalitas;

7. Akuntabilitas;

8. Efektivitas dan efisiensi;

9. Keragaman lokal;

10. Keberagaman;

k. Partisipatif.

Dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa (PAD), terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN);
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam pasal 72 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa lainnya dapat berasal dari pendapatan asli desa (PADes) seperti pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya masyarakat, gotong royong dan lain-lain. Alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Untuk itu, pemerintah desa harusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat desa asalkan sumber pendanaan tersebut digunakan untuk belanja program-program pembangunan desa yang tepat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Belakangan dengan belanja desa, dalam pasal 74 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah dan pusat. Belanja pembangunan desa tersebut tidak terbatas pada kebutuhan primer dan pelayanan dasar saja, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Otonomi Desa

Otonomi secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan bahwa desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri.

Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.⁴⁹ Desa merupakan bagian institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diatas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada didalamnya. Pernyataan diatas tersebut di indikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud dari bangsa yang paling konkrit dan nyata (Muarif, 2000:52). Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa

⁴⁹ Boediono, (2000), *Ekonomi Internasional*, BFFE, Yogyakarta hlm. 22



Hak Cipta Ditangguhkan oleh UIN Suska Riau

Hak Cipta Ditangguhkan oleh UIN Suska Riau

1. Diizinkan untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, karena kewenangan desa sudah ada sejak dulu berdasarkan hak asal usul.⁵⁰

Desa merupakan institusi yang otonom dan relatif mandiri. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Dengan begitu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab.

Dengan diundangkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

⁵⁰ Amin Widjaja Tunggal, 2012, Audit kecurangan dan akuntansi forensik, Harvarindo, Jakarta. hlm. 6



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan adat istiadat desa.

Teori tentang Pelayanan Publik

Pengertian Pelayanan Publik

Istilah publik berasal dari bahas inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahkan *Praja*, hanya sejak zaman Belanda kata-kata sansekerta sudah salah kaprah. Arti sebenarnya dari kata Praja adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah Pamong Praja⁵¹. Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, dengan tanpa ada pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kebutuhan masyarakat.

Ada 3 (tiga) alasan mengapa pelayanan public menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan *good governance* di Indonesia yaitu:

- a. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah.
- b. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi.
- c. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek *clean* dan *good governance* dapat diartikulasikan secara mudah.

Menurut Robert yang dimaksud dengan “pelayanan publik adalah segala

⁵¹ Inu Kencana Safiee, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta, Penerbit Rineka Cipta: 2010). hlm. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban.

Sedangkan menurut Widodo. “Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.”⁵²

Sedangkan di dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam Undang-Undang tersebut meliputi:

- b. Kepentingan Umum yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- c. Kepastian Hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- d. Kesamaan hak yaitu pemberi pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- e. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan

⁵² Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan Dan Implementasi*, Cet.ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2010). hlm 3

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

f. Ke profesionalan yaitu pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Partisipatif yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

h. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

i. Keterbukaan yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses memperoleh informasi mengenai pelayanan yang di inginkan.

j. Akuntabilitas yaitu proses penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

k. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian kemudahan kepada kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

l. Ketepatan waktu yaitu penyelesai setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

m. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.⁵³

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pemenuhan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara

⁵³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu, harus dilakukan secara profesional sehingga mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depan sendiri. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilities dari pemberi layanan (aparatur pemerintahan) dengan ciri sebagai berikut:

1. Efektifitas lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran.
- f. Sederhana prosedur/tata pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit.
- g. Transparan adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, pernyataan, dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik tersebut.
- h. Efisiensi persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan.
- i. Keterbukaan berarti prosedur/tatacara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh masyarakat.
- j. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



k. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang dilayani.

Bentuk-bentuk Pelayanan Publik

Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terdiri dari berbagai macam bentuk.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik. Misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan, dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP.
2. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan publik. Misalnya penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain.
3. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain.⁵⁴

Dalam konteks ini, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat yang merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan pemerintah atau organisasi publik kepada masyarakat secara materi maupun non materi. Pelayanan umum

⁵⁴ Ratminto, Dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005). hal. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 81 Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Hak dan Kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
- b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas.
- c. Mutu, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵ Menurut moenir bentuk pelayanan ada 3 (tiga) macam yaitu:

1) Pelayanan dengan lisan

Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang-

⁵⁵ Sedermayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Bagian Yang Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 193



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia.

2) Pelayanan melalui tulisan.

Dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan dapat berupa pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sering terjadi.

3) Pelayanan berbentuk perbuatan

Pelayanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan dan penjelasan secara lisan.⁵⁶

3. Sistem pelayanan

Sistem pelayanan umum pada dasarnya merupakan satu kesatuan faktor yang dibutuhkan dalam terselenggaranya suatu pelayanan publik. Sistem pelayanan publik ini terdiri atas tiga faktor:

1. Sistem atau prosedur dan metode yaitu dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur, dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
2. Personil terutama ditekankan pada perilaku aparatur yaitu dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin, dan terbuka kritik dari pelanggan atau masyarakat.
3. Sarana dan prasarana yaitu pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja

56. Moenir, H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) hlm. 190



serta fasilitas pelayanan publik misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai⁵⁷.

Pelayanan merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perusahaan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan ditetapkan. Sedangkan menurut Rowland standar adalah spesifikasi dari fungsi atau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pelayanan yang diselenggarakan dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam pelayanan yang disebut konsumen adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas organisasi ataupun petugas dari organisasi pemberi pelayanan tersebut, pelayanan dapat dirasakan apabila dilaksanakan oleh karena itu pelayanan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan.
- b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya berupa tindak sosial; dan sifatnya dengan barang jadi.
- c. Produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya peristiwa nya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.²⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011). hlm.123



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning sudah berjalan namun belum terlaksana dengan baik sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

2. Faktor penghambat pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning adalah diantaranya; (i) kurangnya kedisiplinan aparatur desa; (ii) tidak ada standar pelayanan minimal desa; serta (iii) kurangnya sarana dan prasarana Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Saran

Untuk terlaksananya pelayanan Publik yang baik dalam penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

Sebagaimana yang telah di atur didalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa disarankan agar harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sebagaimana hasil penelitian bahwa faktor faktor penyebab kurangnya baiknya pelayanan adalah (i) kurangnya kedisiplinan aparatur desa; (ii) tidak adanya standar pelayanan minimal desa; serta (iii) kurangnya sarana dan prasarana Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, maka kedepannya harus lebih baik lagi agar terciptanya suatu pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Andoel Djamil R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Abu Samah dan Abu Samah, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Indonesia*, STAI M Pekanbaru: Lukman Edi Press 2016
- Arif Seti Winarsih Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Busrizati M., *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media, 2013
- H.A.S, Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2007
- _____, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hanitijo Soemitro Rony, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Hestu Cipto Handoyo B, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Andi Offset, 2003
- Huda Nimatul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2013
- Istianto Bambang, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011
- Kencana Safiee Inu, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Rineka Cipta: 2010
- Nawaw Hadaridan Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, Yogyakarta: UGM Press, 1995
- Noor Hardiansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011

Sinambela Lijan, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan Dan Implementasi*, Cet.ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Radjab Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005

Saduh, Irawan Tahir, Wasistiono *Prospek Perkembangan Desa*, Bandung : CV Fokus Media, 2007

Sudjana, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Yogyakarta : Thafa Media, 2016

Sedermayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Bagian Yang Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Bandung : Mandar Maju, 2004

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998

Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Suhartono, dkk, *Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonoi Daerah*, Jokyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2001

Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo, 2011

Tabran Rusyan H.A., *Membangun Desa Berprestasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018

Tamim, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo 2009

Trisanto Sumantri Bambang, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung : Fokusmedia, 2011

Wastiono Sadu, M. Irawan Tahir, *Prospek Pengermbangan Desa*, Jakarta: Fokus Media, 2007

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika,2011), h.17

B. Peraturan Perundangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelakasana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAYANAN TERHADAP PENYEDIA DATA PENDUDUDUDKAN DAN PERTANAHAN BERDASARKAN PASAL 5 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAAN MINIMAL DESA DI KANTOR DESA LUBUK BESAR KECAMATAN KUMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"* yang ditulis oleh :

Nama : **HELMY KUSRI**
 NIM : 11657104290
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, SH., MH.

Stretaris
D. M. Alfi Syahrin, SH., MH

Penguji I
P. Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
Lisa Angraini, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag, Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus.S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un 04/F.I/PP.00.9/1494/2021

Pekanbaru, 27 Januari 2021

Bia
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

| | |
|----------|---|
| Nama | : HELMI KUSRI |
| NIM | : 11627104290 |
| Jurusan | : Ilmu Hukum S1 |
| Semester | : IX (Sembilan) |
| Lokasi | : desa lubuk besar kecamatan kemuning kabupaten indragiri hilir |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : pelaksanaan pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 02 tahun 2017 tentang standar pelayanan minimal desa di kantor desa lubuk besar kecamatan kemuning kabupaten inhil.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38540
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Suratohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 100.F.I/P/2020.9/1494/2021 Tanggal 27 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

| | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HELMI KUSRI |
| 2. NIM / KTP | : 11627104290 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA DI KANTOR DESA LUBUK BESAR KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INHIL |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA LUBUK BESAR KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

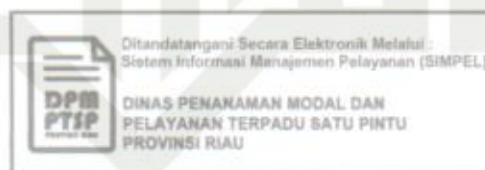
Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Februari 2021



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kapten Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
 - a. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

REKOMENDASI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/42

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Nomor : 007/SP/SP/2021/IZIN-RISET/38540 Tanggal 9 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **HELMI KUSRI**

: 11627104290

Program Studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1

: Lubuk Besar RT.004 - RW.00 Kel. Lubuk Besar Kec. Kemuning

: **PELAKSANAAN PELAYANAN TERHADAP PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA DI KANTOR DESA LUBUK BESAR KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INHIL**

: **DESA LUBUK BESAR KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada kaitannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 25 Februari s/d 25 Mei 2021.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 25 Februari 2021

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE

Penata TK. I

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Dikirimkan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



SURAT KETERANGAN

Sebelah Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: HELMI KUSRI
: 11627104290
: ILMU HUKUM
: PELAYANAN TERHADAP PENYEDIAAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN PERTANAHAN BERDASARKAN PASAL 5
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA DI
KANTOR DESA LUBUK BESAR KECAMATAN KEMUNING

Embimbing : Syafrinaldi, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

An. Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alim Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Helmi Kusri**, anak pertama dari dua bersaudara yang lahir pada tanggal 12 Maret 1997 dari pasangan ayahanda Kurnia dan ibunda Sri Banun. Dan memiliki satu saudara bersaudara kandung yaitu Hera Putri Ani.

Penulis mengawali pendidikan tahun 2004 SDN 003 Lubuk Besar Kec. Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. lulus tahun 2010, kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di Pasar Kembang Kec. Keritang, (Kab Indragiri Hilir) dan lulus tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang di Pasar Kembang Kec. Keritang, (Kab Indragiri Hilir) kemudian lulus

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2016 di fakultas Syariah dan Hukum Strata Satu (S1), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Puyo Kec. Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Hingga akhirnya, pada tanggal 06 Agustus 2021 penulis mengikuti ujian Sidang Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Memuaskan” serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

SH).

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.